

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah proses tukar – menukar yang saling menguntungkan dan melibatkan lebih dari satu negara (Adolf, 2005). Menurut Salvatore (2008) perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan suatu negara (*trade as engine of growth*). Perdagangan internasional cenderung mengarah pada kegiatan perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan konsep perdagangan yang tidak dibatasi oleh kebijakan pemerintah terutama sektor ekspor dan impor. Menurut Adam Smith, konsep perdagangan bebas akan menguntungkan individu maupun masyarakat secara keseluruhan, jika perdagangan internasional dilakukan secara bebas dan pemerintah tidak perlu menetapkan kebijakan apapun terkait perdagangan bebas. Perdagangan bebas ditunjukkan dengan adanya proses integrasi antar negara terutama dalam aktivitas ekonomi dan perdagangannya. Salah satu bentuk integrasi perdagangan antar negara adalah liberalisasi perdagangan.

Carbaugh (2010) menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi bahkan menghilangkan hambatan perdagangan baik secara tarif maupun nontarif, sehingga proses liberalisasi akan menurunkan hambatan yang ditetapkan oleh suatu negara. Menurut Ferdihanustyan & Pangestu (2003), Indonesia telah ikut dalam proses liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan ikut sertanya Indonesia dalam keanggotaan organisasi besar di dunia seperti *World Trade Organization* (WTO), *Asian Free Trade Area* (AFTA), dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC).

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum kerjasama yang berdiri pada tahun 1989 dan beranggotakan 21 ekonomi di lingkaran Samudera Asia-Pasifik. Dibentuknya APEC dilatarbelakangi dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan

investasi yang lebih bebas dan terbuka di Kawasan regional APEC serta meningkatkan kerja sama guna pengembangan kapasitas ekonomi anggota APEC sendiri. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bogor tahun 1994 menghasilkan kesepakatan “*The Bogor Goals*”. Kesepakatan ini berisikan komitmen untuk negara dengan perekonomian yang maju untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas terbuka pada tahun 2010, dan perekonomian berkembang pada tahun 2020.

Pada November 2020 silam, Presiden Joko Widodo menghadiri KTT APEC secara virtual. KTT APEC pada tahun 2020 secara spesifik membahas dua agenda utama, yaitu kerja sama penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi di kawasan serta pembahasan visi APEC Pasca-2020. Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya APEC untuk membangun kembali komitmen sekuat yang pernah dilakukan pada tahun 1994 lalu.

Bogor Goals dinilai masih relevan sampai saat ini, termasuk didalamnya mengenai pentingnya memperkuat sistem pasar terbuka dan multilateral serta tebalnya hubungan kerja sama dalam mencapai tatanan ekonomi yang saling menguntungkan antar anggota. Pada akhirnya, KTT APEC 2020 menghasilkan dokumen lanjutan Visi APEC Pasca-2020 yang kemudian dinamakan *APEC Putrajaya Vision 2040*. Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa *APEC Putrajaya Vision 2040* merupakan kelanjutan dari *Bogor Goals* yang telah mencapai tenggatnya pada tahun 2020 silam. Fokus visi APEC yang tercantum pada *Bogor Goals* adalah terbukanya akses perdagangan. Pelaksanaan *Bogor Goals* tertuang dalam *Osaka Action Agenda* (APEC, 1995). Tertulis pada *Osaka Action Agenda* bahwa dalam mengimplementasikan *Bogor Goals*, target utama anggota APEC adalah penurunan tarif.

APEC memiliki dua kategori perekonomian tiap anggotanya yaitu perekonomian maju (Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, dan Amerika Serikat) dan perekonomian berkembang (Brunei Darussalam, Chili, Cina, Taipei, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Taiwan, Peru, Korea, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand, dan Vietnam). Perkembangan kedua kategori anggota ekonomi APEC tersebut memiliki perkembangan tarif yang berbeda-

beda. Ekonomi maju anggota APEC memiliki rata-rata tren tarif yang menurun dan stabil. Australia, Kanada, Jepang, dan Selandia Baru memiliki rata-rata tarif yang stagnan dan menurun (APEC, 2019). Persentase laju tarif MFN ekonomi maju APEC (Amerika, Australia, Jepang, Kanada, dan Selandia Baru) dapat dilihat pada Lampiran 1.

Grafik laju persentase tarif MFN ekonomi berkembang APEC pada Lampiran II menunjukkan perbandingan tarif MFN di antara ekonomi berkembang APEC (Brunei Darussalam, Vietnam, Peru, Meksiko, Filipina, Indonesia, Malaysia dan Chili, China, Rusia, Singapura dan Korea). Tarif MFN ekonomi berkembang menunjukkan tren tarif yang menurun dan stagnan. Walaupun ekonomi berkembang memiliki tren yang menurun, rata-rata tarif ekonomi berkembang APEC masih relatif tinggi yaitu sebesar 6,9 persen dibandingkan rata-rata tarif ekonomi maju APEC yaitu hanya sebesar 3,6 persen.

Tren kenaikan tarif di Indonesia adalah bentuk tindakan perlindungan sektor domestik. Tarif impor Indonesia mengalami kenaikan tertinggi per tahun 2015 dari 6,9 persen ke 7,9 persen pada tahun 2016. Kenaikan tarif impor ini tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/2015. Dilansir dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, kenaikan tarif bea masuk dimaksudkan untuk mendorong kinerja industri di Indonesia.

Perbandingan antara rata-rata tarif MFN ekonomi berkembang APEC dengan rata-rata tarif MFN APEC pada lampiran III. menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Tarif MFN untuk ekonomi berkembang APEC berfluktuasi dan menurun per tahun 2020 pada angka 6,1 persen. Tarif MFN APEC secara keseluruhan mengalami tren penurunan. Sementara tarif MFN Indonesia berfluktuasi namun cenderung naik sampai pada angka 8,1 persen per tahun 2020.

Tujuan dari *Bogor Goals* adalah liberalisasi perdagangan untuk membuka arus perdagangan antar anggotanya. Liberalisasi adalah proses negosiasi antar negara dalam mencapai kesepakatan terkait peraturan kegiatan perdagangan internasional yang berkelanjutan (George, 2010). Menurut George,

secara teoritis liberalisasi melalui pengurangan hambatan perdagangan dapat memberi manfaat berupa kenaikan pada nilai perdagangan suatu negara. Menurut Balassa (1984) mengemukakan bahwa dalam mengukur kepentingan suatu negara dalam melakukan liberalisasi perdagangan dengan negara lain, dapat dilakukan dengan melihat bagaimana liberalisasi itu dapat mempengaruhi volume dan arus ekspor di dalam negara tersebut.

Menurut Sofjan (2017) Pelaksanaan liberalisasi perdagangan yang berkepanjangan dapat memperluas perdagangan luar negeri suatu negara. Kegiatan liberalisasi perdagangan dipercaya dapat memperluas pasar, memperbesar skala ekonomi, serta mempermudah arus ketersediaan input dan output yang lebih terjangkau di seluruh dunia (Asian Development Bank, 2019). Di sisi lain menurut Thirlwall (2000) liberalisasi perdagangan tidak secara langsung mempercepat pertumbuhan ekspor, namun kedua hal tersebut saling berkorelasi.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, diharapkan aktivitas liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan aktivitas ekspor di Indonesia. Laju ekspor Indonesia intra-APEC pada lampiran IV. masih rendah apabila dibandingkan dengan negara anggota lain yang memiliki tren tarif yang tinggi (Cina, Korea, Singapura, Amerika) selama tahun 2006-2020. Dapat dilihat aktivitas ekspor Indonesia cenderung memperlihatkan tren menurun dengan angka terendah pada tahun 2016 yaitu 100,011.7 juta USD dan tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 149,024.1 juta USD. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor Indonesia Intra-APEC belum maksimal, dengan kata lain Indonesia belum merasakan manfaat dari penurunan tarif APEC.

Indonesia dalam upaya menuju liberalisasi perdagangan perlu mengetahui akibat dari terlibatnya Indonesia di dalam visi *Bogor Goals* terutama pasca fase pertama yang mengharuskan anggota ekonomi negara berkembang untuk mencapai liberalisasi perdagangan. Mengingat bahwa perdagangan internasional yang bebas sebagaimana pendapat Adam Smith harusnya memberi keuntungan untuk negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari

liberalisasi perdagangan antar ekonomi anggota APEC pada fase *Bogor Goals* (2010-2020) pada tingkat ekspor Indonesia.

Penelitian ini menggunakan ekspor sebagai variabel dependen dan variabel independen yaitu tarif impor dan *trade openness* sebagai proksi liberalisasi perdagangan. Tarif yang dimaksud adalah tarif impor MFN (*Most-Favored-Nation*) sebagaimana diterapkan dalam APEC. Adapun variabel kontrol lain sebagai pendukung penelitian ini yaitu nilai tukar mitra dagang terhadap USD (LCU per USD) yang menggambarkan paritas daya beli suatu negara. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar mitra dagang terhadap USD (LCU per USD). Apabila nilai tukar mitra dagang (APEC) mengalami apresiasi, maka daya beli suatu negara menguat sehingga permintaan untuk barang luar negeri meningkat dan mampu mendorong ekspor kita.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan jumlah populasi untuk menggambarkan daya beli masyarakat secara agregat. PDB suatu negara mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin tinggi PDB mitra dagang (APEC) maka dianggap daya beli masyarakatnya tinggi untuk barang ekspor Indonesia. Populasi menggambarkan daya beli masyarakat secara agregat. Apabila populasi mitra dagang (APEC) tinggi maka negara tersebut dapat menjadi arus sumber permintaan untuk barang ekspor Indonesia. Adapun pengaruh determinan lain seperti jarak untuk menganalisis pola perdagangan secara geografis.

Penelitian ini menggunakan data panel Indonesia dan ekonomi anggota APEC (Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Amerika Serikat, Vietnam, Peru, Meksiko, Filipina, Malaysia, Cina, Brunei Darussalam, Rusia, Singapura dan Korea) pada tahun 2006-2020. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu oleh Erlando et al. (2019) yang menggunakan variabel tarif dan *trade openness*, nilai tukar, PDB, populasi dan Jarak negara Cina, Korea dan Jepang dalam mengukur kinerja ekspor Indonesia dan menyimpulkan bahwa nilai tukar dan tarif memiliki korelasi negatif dengan ekspor. PDB, derajat keterbukaan, dan populasi ketiga negara *partner* bernilai positif terhadap nilai ekspor Indonesia, sementara Jarak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sejalan dengan

penelitian serupa yang dilakukan oleh Aida & Riyanto (2021) dengan menambahkan variabel Kemiskinan dan Inflasi yang menyimpulkan bahwa variabel kemiskinan adalah signifikan sementara inflasi tidak signifikan pada ekspor Indonesia. Sebaliknya Malik et al. (2006) berpendapat bahwa tarif impor justru positif terhadap perkembangan neraca perdagangan dan dipercaya dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia, Osakwe et al. (2018) juga menemukan bahwa liberalisasi perdagangan justru dapat mendorong diversifikasi ekspor. Dalam meneliti posisi Indonesia di APEC telah dilakukan penelitian oleh Ambariyanto (2008) yang menjelaskan bahwa kinerja ekspor Indonesia membaik setelah masuk ke APEC dibanding sebelum menjadi anggota APEC.

Berdasarkan literatur yang telah dijelaskan, maka penelitian ini menggunakan persentase tarif impor MFN dan *Trade Openness* anggota APEC sebagai proksi liberalisasi perdagangan. Variabel proksi liberalisasi perdagangan akan digunakan untuk melihat dampak liberalisasi perdagangan APEC terhadap laju ekspor Indonesia intra-APEC selama fase *Bogor Goals*. Adapun variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini yaitu nilai tukar (LCU per USD), PDB per kapita (miliar USD), Populasi (ribu jiwa), dan Jarak (km).

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil rumusan masalah untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Tarif terhadap Ekspor Indonesia ke ekonomi anggota APEC di fase *Bogor Goals*?
2. Bagaimana pengaruh *Trade Openness* ekonomi anggota APEC terhadap Ekspor Indonesia ke ekonomi anggota APEC di fase *Bogor Goals*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian dapat ditulis sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Tarif terhadap Ekspor Indonesia ke ekonomi anggota APEC di fase *Bogor Goals*

2. Mengetahui pengaruh *Trade Openness* ekonomi anggota APEC terhadap Ekspor Indonesia ke ekonomi anggota APEC di fase *Bogor Goals*

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat ilmiah: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pada *research gap* pada ilmu ekonomi
2. Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku ekonomi khususnya dengan konsentrasi ekonomi perdagangan internasional dan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak yang ingin meneliti maupun mempelajari tentang hubungan antara Nilai Tukar, PDB, Tarif, *Trade Openness*, Populasi, Jarak dan Ekspor.

